

# KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF (DPRD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERIODE 2019-2024

Elma Thiana  
NPP. 30.1089

Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email: elmathiana329@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini., S.STP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The importance of community participation in politics, especially in conveying aspirations represented to people entrusted by the community, which is called representation. Sometimes representation is still an imbalance based on gender between men and women. Women's representation has an important role to play in considering that all have the same right to express aspirations as a form of democracy. As for Sumbawa, the representation of women in the West Sumbawa Regency DPRD is less than the representation of men. **Purpose:** The purpose of the study is to examine women's representation in the DPRD membership for the 2014-2019 period and analyze the inhibiting factors and efforts made. **Methods:** Using descriptive qualitative methods through data collection techniques with interviews, observations, and documentation. **Results:** The result is that the law has provided regulations regarding the opportunities for women's representation in the people's representative institutions by requiring political parties to include at least 30% women. The West Sumbawa Regency DPRD does not guarantee that it can occupy a position as a member of the West Sumbawa Regency DPRD. Members of the West Sumbawa Regency DPRD from the 2019 election yesterday amounted to 25 people consisting of 23 male members, and 2 female members. **Conclusion:** From the results of the analysis conducted by the author, when women are present in the realm of parliament, many explore that the presence of women is only as a representative of women, even if accompanied by qualifications and experience in women's organizations that can support women in representation in the political sphere.

**Keywords:** Women's representation; Sumbawa Regency DPRD; Party Faction

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Pentingnya partisipasi masyarakat dalam dunia politik terutama dalam penyampaian aspirasi yang diwakilkan kepada orang yang dipercayakan masyarakat yang disebut sebagai keterwakilan. Terkadang keterwakilan masih terdapat ketidakseimbangan berdasarkan gender antara laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan memiliki peranan penting meninjau

semua memiliki hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi sebagai bentuk demokrasi. Adapun di Sumbawa yang keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat lebih sedikit dari keterwakilan Laki-Laki. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian untuk mengkaji keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD periode 2014-2019 serta menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dilakukan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil :** Hasil yang didapatkan adalah undang-undang telah memberikan aturan mengenai peluang keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dengan mewajibkan partai politik mengikutsertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tidak menjamin dapat menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat hasil Pemilu Tahun 2019 kemarin berjumlah 25 orang dengan terdiri dari 23 orang anggota Laki-Laki, dan 2 orang anggota Perempuan. **Kesimpulan :** dari hasil analisa yang dilakukan oleh penulis bahwa saat perempuan hadir dalam ranah parlemen, banyak yang mengekspolarasi bahwa kehadiran perempuan hanya sebagai perwakilan perempuan saja, bahkan jika disertai dengan kualifikasi dan pengalaman dalam berorganisasi perempuan yang dapat mendukung perempuan dalam keterwakilan dalam ranah politik.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan; DPRD Kabupaten Sumbawa; Fraksi Partai

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum (Liando, 2016). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang memuat kebijakan mengharuskan partai politik menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan baik dalam pendirian maupun kepengurusan pada tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa jumlah minimal 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan yang berdampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Kenyataan perempuan di seluruh dunia termasuk di Indonesia masih bernasib buruk: pertama, kedudukan perempuan masih dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki; kedua, jika dibandingkan dengan laki-laki perempuan masih sulit dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja (Nurchahyo, 2008).

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 114.951 jiwa, dalam kurun waktu 7 tahun dari tahun 2020 meningkat menjadi 140.890 jiwa dengan laju pertumbuhan 25,89%, sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 144.707 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,71%. Dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif maka telah dikeluarkannya peraturan mengenai *Affirmative Action* yang merupakan kewajiban mengikutsertakan perempuan minimal 30% dalam pelaksanaan pencalonan calon anggota legislatif.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ketimpangan akan keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan publik mengakibatkan perempuan mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan lainnya. Tindakan *Affirmative action* merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada kaum perempuan untuk seluas-luasnya dapat berkiprah dalam dunia politik, terlebih dengan adanya patokan kuota sebanyak 30% untuk keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di parlemen merupakan tantangan yang lebih berat dibandingkan perjuangan politisi laki-laki (Suciptaningsih, 2010). Dalam realitas sosial perempuan masih belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif Kabupaten Sumbawa Barat khususnya legislatif Sumbawa Barat Periode 2019-2024.

**Tabel 1.1**

**Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Perempuan Pemilu Legislatif Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019**

No	Partai Politik	Jumlah Caleg			Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan
		Jumlah Caleg	Caleg Perempuan	%	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	19	7	36,8%	Memenuhi
2.	Partai Gerindra	23	8	34,7%	Memenuhi
3.	Partai PDI Perjuangan	19	7	36,8%	Memenuhi
4.	Partai Golkar	24	9	37,5%	Memenuhi
5.	Partai Nasdem	25	8	32%	Memenuhi
6.	Partai Berkarya	25	8	32%	Memenuhi
7.	Partai Keadilan Sejahtera	25	8	32%	Memenuhi
8.	Partai Solidaritas Indonesia	23	8	34,7%	Memenuhi
9.	Partai Persatuan Pembangunan	25	9	36%	Memenuhi
10.	Partai Solidaritas Indonesia	3	2	66,6%	Memenuhi

No	Partai Politik	Jumlah Caleg			Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan
		Jumlah Caleg	Caleg Perempuan	%	
11.	Partai Amanat Nasional	25	8	32%	Memenuhi
12.	Partai Hanura	24	9	37,5%	Memenuhi
13.	Partai Demokrat	25	9	37,5%	Memenuhi
14.	Partai Bulan Bintang	22	8	36,3%	Memenuhi
15.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	21	7	33,3%	Memenuhi

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa barat, 2022

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2019 kemarin telah memenuhi kuota 30%, namun jumlah yang keterwakilan perempuan yang terpilih sangat sedikit yaitu 2 dari 25 anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) belum tentu terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tidak menjamin dapat menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat hasil Pemilu Tahun 2019 kemarin berjumlah 25 orang dengan terdiri dari 23 orang anggota Laki-Laki, dan 2 orang anggota Perempuan.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan penulis membutuhkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan atau masukan bagi kesempurnaan penelitian ini. Yang pertama adalah '*Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Isnaini Rodyah*'. Dari penelitian tersebut menunjukkan masih terdapat keterbatasan akses membuat perempuan mengalami kesulitan untuk menunjukkan bahwa kepentingannya tidak terakomodir dalam sistem politik. Hal tersebut ditandai dengan masih minimnya (belum memenuhi kuota) keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sidoarjo. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji partisipasi, kualitas, dan tanggung jawab keterwakilan perempuan di ranah politik (Rodyah, 2016). Peraturan kedua yakni berjudul '*Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh Feni Arlina*'. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berfluktuasi. Pada periode tahun 2009-2014 ada 11 orang anggota DPR perempuan dari keseluruhan 55 anggota DPR, selanjutnya pada tahun 2014-2019 mengalami penurunan menjadi 6 orang anggota DPR perempuan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masih

sangat rendah dan tidak mencapai 30%, sehingga harus ditingkatkan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan sumbangsih pemikiran, masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengaktualisasikan hak-haknya (Arlina, 2019). ). Penelitian yang ketiga adalah penelitian dengan judul '*Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024) oleh Try Damayanti*'. Dari hasil penelitian dan wawancara menghasilkan kesimpulan bahwa komposisi dan posisi dari keterwakilan 9 anggota DPRA dibarengi dengan pembekalan di dalam partai internal serta dapat terjun langsung ke masyarakat. Kebanyakan dari anggota perempuan DPRA disosialisasikan mengenai masalah perempuan itu sendiri. Setiap tahunnya anggota DPRA perempuan mengalami naik turun. Pada tahun 2014-2019 jumlah kursi yang diisi mencapai 12 orang perempuan yang mewakili di lembaga politik. Namun pada tahun 2019-2024 menurun menjadi 9 kursi untuk perempuan yang menjabat dilembaga politik. Sejauh ini banyak kendala yang menjadikan keterwakilan dilembaga minim, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat Aceh yang tidak paham akan politik (Damayanti, 2021). Penelitian keempat berjudul '*Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 oleh Ani Martini*'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kepercayaan diri dari perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislatif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat patriarki dan kendala politik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislatif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat (Ani Martini, Maichel Wutoy, 2021). Kemudian penelitian kelima berjudul '*Perempuan, Politik, Dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014) oleh Ririn Ramdhani*'. Hasil penelitian di salah satu daerah khusus penelitian penulis di DPRD Kota Makassar terdapat 50 anggota legislator dan 8 di antaranya legislator perempuan. Kurangnya perempuan yang terpilih menimbulkan permasalahan karena dalam PKPU No. 7 tahun 2013 tentang aturan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten menegaskan keharusan kuota perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan. Keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Makassar belum mencapai kuota 30% yang sudah ditetapkan, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat berpengaruh dikarenakan wakil ketua III DPRD Kota Makassar adalah legislator perempuan (Ramdani, 2016).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2019-2024 yang berfokus pada penyebab rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dan strategi yang dihasilkan dari penelitian ini yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai upaya guna untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD pada periode selanjutnya.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD, serta Untuk merumuskan strategi meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode mendatang.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif (Juliansyah, 2011). Dalam Penelitian kualitatif menurut Creswell (Juliansyah, 2011) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami”. Dalam penelitian kualitatif untuk melakukan analisis data lebih cenderung secara induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Perempuan Terpilih, Kepala Sekretariat Dewan, Ketua KPU, Kepala Dinas Bakesbangpol, Ketua Partai PDI Perjuangan, Ketua Partai Gerindra, Calon Anggota Dewan Perempuan Yang Tidak Terpilih, serta Masyarakat ( dalam hal ini peneliti mewawancarai sebanyak 5 orang). Adapun Analisisnya menggunakan Teori Perwakilan menurut Jhon Whalke dalam sanit (1985) dan menggunakan Analisis Strategi untuk meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan Analisis Strategi (SWOT) menurut Rangkuti (2015:84).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Legislatif (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat dengan memperhatikan penyebab rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD menggunakan Teori Perwakilan Menurut Jhon Walke dalam Sanit (1985) yang menyatakan terdapat 6 dimensi yaitu Terwakil, wakil, cara Jadi Wakil, Posisi Wakil, Tanggapan Wakil, dan Kontak antara Wakil dengan Terwakil. Serta melakukan analisis Strategi untuk meningkatkan Keterwakilan perempuan Dalam Keanggotaan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan Analisis Strategi (SWOT) Menurut Rangkuti (2015:84).

Adapun Pembahasan dapat Dilihat pada Subbab berikut:

### 3.1 Teori Perwakilan menurut Jhon Whalke terdiri dari:

#### 3.1.1. Terwakil

Dari segi Terwakil terdapat 3 kemungkinan yang dapat di dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil, yaitu : memberikan perhatian kepada kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili.

### 3.1.2. Wakil

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Anggota DPRD dan Daerah Pilihan di Kabupaten Sumbawa Barat**  
**Periode 2019-2024**

No	Nama Anggota	Nama Partai	Daerah Pilihan
1.	Muhammad Saleh, SE	PDI Perjuangan	Taliwang
2.	Merliza, S.Sos, I., MM	Gerindra	
3.	Kaharuddin Umar	PDI Perjuangan	
4.	Muhammad Yamin	PDI Perjuangan	
5.	Masadi, SE	Nasdem	
6.	Baharung	PKS	
7.	Amiruddin, SE	PPP	
8.	Mohammad Hatta	PAN	
9.	Ahmad, S.Ag	Demokrat	
10.	Muhammad Nur, SH	PBB	
11.	Andi Laweng SH, MH	PKP Indonesia	
12.	Kondi Pranata	PKB	
13.	Nurjannah	PDI Perjuangan	
14.	Hasanuddin	PDI Perjuangan	
15.	Mancawari LM, S.IP	Golkar	
16.	Mustafa, HZ	Nasdem	
17.	Taufiqurrahman	PKS	
18.	Agusfian, SE	PBB	
19.	Aheruddin, SE, ME	PKP Indonesia	
20.	Sudarli, S.Pd	PKB	- Jereweh - Maluk - Sekongkang
21.	Abdul Haman	Gerindra	
22.	Abidin Nasar, SP, MP	PKS	
23.	H. Riyadi, SE	PAN	
24.	Ikhwansyah	Demokrat	
25.	Drs. Syafruddin, M.Si	PPP	

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, 2023

Tabel diatas merupakan nama dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat terpilih periode 2019-2024 berdasarkan daerah pilihannya yang terdiri dari 25 orang anggota yaitu 23 orang anggota laki-laki dan 2 orang anggota

perempuan yaitu ibu Merliza, S.Sos, I., MM yang terpilih melalui Dapil I dan ibu Nurjannah yang terpilih melalui Dapil II.

Dari segi wakil, wakil perempuan yang terpilih hanya 2 orang dengan memperhatikan kemampuan dana dan kedekatan sosial serta tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

### **3.1.3. Cara Menjadi Wakil**

Dari segi cara menjadi wakil. Cara yang dilakukan oleh para calon legislatif adalah dengan mencari simpatik masyarakat, yang dimana hal tersebut tentunya bervariasi namun pada dasarnya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, turun langsung ke daerah pemilihan dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat serta agar dimana dikenal oleh masyarakat dan paling banyak dilakukan oleh para calon dengan memberikan bantuan-bantuan ataupun sumbangan bagi masyarakat yang tidak mampu.

### **3.1.4. Posisi Wakil**

Dari segi Posisi Wakil. Setiap wakil perlu menentukan posisinya terhadap terwakil manakala ia terlibat dalam suatu keputusan masalah, karena hal ini berpengaruh terhadap keputusan apa yang akan ditetapkan terkhusus dalam pelaksanaan sidang.

### **3.1.5. Tanggapan Wakil**

Dari segi tanggapan wakil. Ada 4 (empat) komponen tanggapan wakil yang secara menyeluruh membangun keterwakilan politik, yaitu tanggapan dalam bidang kebijaksanaan, bidang pelayanan, dalam hal pengalokasian kebutuhan publik dan yang berkenaan dengan simbol-simbol. Tanggapan wakil terhadap masyarakatnya dapat dilihat dari sikap dan tindakan anggota DPRD perempuan dalam menghadapi masalah yang terkait dengan permasalahan kaum perempuan. Karena wakil yang terpilih sudah menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hak seharusnya yang sudah memilikinya.

### **3.1.6. Kontak Wakil dengan terwakil**

Dari segi kontak wakil dengan terwakil. Kesepakatan di antara kedua pihak mengenai apa yang diperlukan terwakil dan tersedianya kemungkinan bagi wakil untuk memenuhi keperluan tersebut jelas mempunyai kaitan langsung dengan tanggapan yang seharusnya diberikan wakil. Hubungan komunikasi antara anggota DPRD perempuan dan masyarakat dalam membuat keputusan, sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya hubungan diantara wakil dan terwakil akan menentukan keberhasilan wakil dalam memenuhi tugasnya.

## **3.2 Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif pada periode mendatang yaitu:**

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan Analisis SWOT Menurut Rangkuti (2015:84), sesuai dengan yang terjadi di lapangan, maka strategi yang dapat dilakukan dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Sumbawa barat, yaitu:

1. Adanya Peraturan mengenai *Affirmative Action* dapat digunakan untuk melakukan pembentukan Tim sukses berbasis Patronase.
2. Dengan adanya Kebijakan *Affirmative Action* dapat membuat perempuan aktif dalam kegiatan organisasi.



3. *Affirmative Action* digunakan untuk mencari relasi dengan memanfaatkan jaringan partai politik.
4. Adanya peluang yang dimiliki oleh perempuan dengan memanfaatkan Tim sukses berbasis patronase yang dapat membuat menurunkan adanya budaya patriarki yang beredar dilingkungan masyarakat.
5. Adanya kemampuan berani aktif dalam suatu organisasi akan menumbuhkan semangat untuk berkembang dan diharapkan dapat menurunkannya budaya patriarki yang ada.
6. Adanya jaringan sosial politik yang dimiliki dapat membuat calon legislative perempuan tersebut menjadi berani dan tidak takut bersaing meskipun adanya budaya patriarki.
7. Tim sukses berbasis patronase biasanya terdiri dari orang-orang terdekat yang memungkinkan caleg perempuan tersebut mampu membagi perannya, sehingga tidak menimbulkan peran ganda.
8. Perempuan yang berani aktif dalam suatu organisasi adalah orang yang mampu menempatkan dirinya, sehingga peran ganda tersebut tidak akan mempengaruhi dirinya.
9. Pemanfaatan jaringan politik yang dimiliki memungkinkan caleg perempuan mendapatkan kemudahan dalam hal berorganisasi, sehingga mampu menempatkan diri baik sebagai ibu rumah tangga, maupun anggota organisasi politik.
10. Mensosialisasikan peraturan *Affirmative Action* mengenai keterwakilan 30% perempuan dapat dimanfaatkan dengan baik guna mengurangi politik kepentingan yang dapat menghambat partisipasi perempuan
11. Menghindari Budaya patriarki dapat menghambat partisipasi perempuan karena dapat dimanfaatkan oleh orang yang memiliki kepentingan politik.
12. Menghindari adanya Peran ganda dan adanya politik kepentingan yang dilakukan oleh sekelompok oknum dapat menghambat dan menurunkan tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Sumbawa Barat.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penerapan *Affirmative Action* yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat sudah diterapkan dan berjalan dengan baik walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya karena adanya faktor penghambat. Penerapan *Affirmative Action* menjadi salah satu syarat utama yang harus ditetapkan oleh partai politik ketika hendak melaksanakan pencalonan dan pendaftaran Calon anggota Tetap pencalonan legislatif DPRD. Temuan yang penulis dapatkan yaitu masih kurang sadarnya dan masih rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk terjun dan berpartisipasi aktif menjadi anggota legislatif dikarenakan faktor penghambat yang dihadapi, kemudian hubungan sosial dengan organisasi perempuan partai politik dan pemilih atau masyarakat masih kurang sehingga keterwakilan perempuan di DPRD rendah, adanya beban ganda yang dimiliki harus dapat membagi fokusnya untuk pekerjaan dan keluarga, serta budaya patriarki yang masih kental di Kabupaten Sumbawa Barat dengan unsur tradisional dan pikir yang kolot menyebabkan terhalangnya kemajuan, perkembangan dan partisipasi perempuan dalam setiap proses politik.

### 3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam upaya meningkatkan keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat yaitu adanya beban ganda yang dimiliki dan diemban oleh perempuan yang hendak berpartisipasi aktif di lingkungan politik yaitu perempuan harus dapat membagi fokusnya untuk pekerjaan dan keluarga.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat sudah terbilang terpenuhi pada saat pencalonan, namun terbilang kurang memenuhi karena jumlah keterwakilan Perempuan menjadi anggota DPRD masih rendah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat baik itu faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut yaitu:

- a. Kepercayaan diri perempuan masih rendah untuk masuk dalam dunia politik dan berpartisipasi aktif menjadi anggota legislatif.
- b. Hubungan sosial dengan organisasi perempuan, partai politik dan pemilih atau masyarakat masih kurang sehingga keterwakilan perempuan di DPRD rendah.
- c. Beban ganda yang dimiliki harus dapat membagi fokusnya untuk pekerjaan dan keluarga.
- d. budaya patriarki yang masih kental di Kabupaten Sumbawa Barat dengan unsur tradisional dan pikir yang kolot menyebabkan terhalangnya kemajuan, perkembangan dan partisipasi perempuan dalam setiap proses politik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi peningkatan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipelajari oleh pemerintah sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kabupaten Sumbawa barat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretariat dewan kabupaten sumbawa Barat beserta jajarannya, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa barat, Kepala Bakesbangpol, Kepala KPU, dan masyarakat yang telah bersedia memberikan kesempatan dan waktu bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan informasi dan data yang menunjang pelaksanaan penulisan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ani Martini, Maichel Wutoy, P. D. W. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal kebijakan pemerintahan*, 4(1), 14–22.
- Arlina, F. (2019). Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1707–1718. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal Feni Arlina \(11-25-19-02-16-45\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal Feni Arlina (11-25-19-02-16-45).pdf)
- Damayanti, T. (2021). *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)*.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Nurcahyo, A. (2008). *Keterwakilan Perempuan Di Parlemen*. 25–34.
- Ramdani, R. (2016). *Perempuan, politik, dan parlemen di kota makassar*. 1–90.
- Rodiyah, I. (2016). *Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. 1–23.
- Suciptaningsih, O. A. (2010). *Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal*. 2(2), 66–73.

